

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2018, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Aristoteles 2017, *Politik*, Narasi Pustaka Promothea, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang.
- Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Josep Riwo Kaho, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok
- Moeljatno, 2009, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Morrisan, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2019, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, PT. RajaGrafindo Perdasada, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2012, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persadam, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan danPembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati dan Walikota

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Jurnal**

Abdul Aziz Hakim. “Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung”. Jurnal Hukum, Vol 18 Oktober 2011, [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com).

Achmaluddin Rajab, “Bagaimanakah Tindakan Kepala Daerah Yang Melakukan Perselingkuhan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?’, Jurnal Rechtsvinding, Januari 2017.

Azmi, *Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 04, Nomor, Agustus 2019

Jimly Assididqie, 2005, Dalam Pengantar Laporan Penelitian, “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenaver Siftung, Jakarta

Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, *Abuse of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No. 1, 2017

Rumsari Hadi Sumarto, *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah*, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 2, Nomor , Oktober

2017

Yulianto. “Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”.  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No.1 Maret 2017.

### C. Internet

<https://www.kompas.com/impeachment> *keganjilan sistem hukum.* html

<https://www.tempo.com/MA:impeachment> *kepala daerah serupa dengan presiden.*html

